

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Kata Pengantar Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D	ix
Daftar Isi	xi
<b>BAB 1 PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN</b>	<b>1</b>
A. Ilmu Pemerintahan dan Pemikiran Awal	1
B. Peranan Lembaga Keilmuan	10
C. Pemerintah dan Pemerintahan	16
<b>BAB 2 DASAR-DASAR PEMERINTAHAN</b>	<b>27</b>
A. Dinamika Teori Pemerintahan	27
B. Fungsi Pemerintahan	33
C. Politik Sebagai Pemerintahan	41
D. Kebutuhan Pemerintahan dan Interaksinya	47
E. Fokus Pelayanan	55
F. Penguasaan Pemerintahan	62
G. Relasi Agama dalam Pemerintahan	66

<b>BAB 3 BEBERAPA PENDEKATAN PEMERINTAHAN</b>	71
Gejala Pemerintahan dan Kesadaran Manusia	71
A. Pendekatan Sosiologis	75
B. Keluarga Sebagai Unit Analisis Pemerintahan	78
C. Kompetisi Pasar dan Tumbuhnya Pemerintahan	80
D. Konflik dan Pemerintah Sebagai Pengendali	84
E. Budaya dan Urgensi Pemerintahan	85
F. Merekonstruksi <i>Kybernology</i>	88
<b>BAB 4 PEMERINTAHAN SEBAGAI ORGANISASI</b>	101
A. Pemerintah Sebagai Pelaku Sempurna	101
B. Pemilihan Tindakan Pemerintah, <i>to be Loved</i> dan <i>to be Fear</i>	104
C. Pemerintahan Sebagai Organisasi	108
D. Pemerintah dan Pengelolaan Kekerasan	111
E. Pemerintahan Sebagai Kebutuhan Bersama	114
<b>BAB 5 PRAKTIK PEMERINTAHAN DAN PROBLEMATIKANYA</b>	119
A. Sistem Pemerintahan	121
1. Sistem dan Praktik Presidensial	122
2. Sistem dan Praktik Parlementer di Beberapa Negara	126

B. Kecenderungan Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Amandemen UUD '45 dan Implikasinya terhadap Pemilihan Presiden Langsung	129
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah, Tantangan dalam Praktik Politik Pemerintahan Kecenderungan Sistem Distrik Sebagai Model Pemilukada	135 137
D. Format Baru Pemerintahan Desa, Sebuah Dilema Panjang terhadap Implementasi Otonomi Desa di Indonesia	141
1. Desa dan Asal-Usulnya Sebagai Unit Pemerintahan	142
2. Tinjauan Otonomi Desa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah	145
3. Format Pemerintahan Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004	146

<b>BAB 6 MENIMBANG KEMBALI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA</b>	155
A. Pendahuluan	155
B. Demokrasi dan Cara Kerjanya	159
C. Realitas Pemilukada di Indonesia	167
D. Urgensi dan Keunggulan Pemilukada Tak Langsung	171
E. Kesimpulan	177

<b>BAB 7 RELEVANSI BASIS REKRUTMEN PAMONG PRAJA TERHADAP KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN INDONESIA</b>	<b>179</b>
A. Pendahuluan	179
B. Konsep Pamong Praja dalam Birokrasi Jawa	181
C. Peran Legitimasi, Kekuasaan, dan Kepemimpinan Elite Pamong Praja dalam Organisasi Pemerintah	183
D. Basis Rekrutmen Pangreh Praja Pra Kemerdekaan	189
E. Basis Rekrutmen Pamong Praja Era Kemerdekaan	192
F. Basis Rekrutmen Pamong Praja Periode 1990-2009	194
G. Peran Pendidikan Pamong Praja dan Penguatan Basis Rekrutmen Bagi Masa Depan Kepemimpinan Pemerintahan	197
H. Tantangan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan	201
I. Prospek Pendidikan Pamong Praja	205
<b>BAB 8 PENDIDIKAN KEPEMERINTAHAN DI INDONESIA</b>	<b>211</b>
A. Sejarah Pendidikan Kepemerintahan di Indonesia	211
B. Kompetensi Pendidikan Kader	217

C. Sistem Pendidikan dengan Orientasi Kader Pemerintahan yang Bersifat <i>Generalis-Spesialis</i>	220
D. Sistem Pendidikan dengan Metode Praktik-Sekolah	223
E. Alasan Pengintegrasian IIP dan STPDN	224
F. Kebijakan dan Tantangan IPDN	227
G. Kesimpulan	233

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>235</b>
<b>TENTANG PENULIS</b>	<b>245</b>